



BLUD-BOS Rp 23 M Sisa



PONTIANAK, TRIBUN

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan pidato jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (21/6/23).

Sebelumnya, Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 pada Selasa 20 Juni 2023 kemarin.

Atas pandangan umum tersebut, Wawako Bahasan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi atas saran dan masukannya terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tahun anggaran 2022.

Ia mengatakan, saran dan masukan itu akan menjadi perhatian pihaknya untuk mengoptimalkan kinerja se-



kami akan berupaya untuk menekan Silpa dengan cara merasionalisasi target pendapatan, target belanja dan target pembiayaan dalam KUA-PPAS disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada

Bahasan
Wakil Wali Kota Pontianak

luruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun realisasi belanjanya.

"Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan sarana

dan prasarana yang bersesuai- Amanat Keadilan Bangsa. tian langsung dengan masyarakat," ujarnya.

Kemudian, terhadap rencana pembangunan jembatan Jalan Bardan Nadi-Siantan masih berproses.

Lebih lanjut, anggaran "Saat ini proses pembangunan Jembatan Garuda sebesar Rp 23 miliar, Bahasan tengah melengkapi data, an menerangkan bahwa komposisi maupun teknis rencana pembangunan jembatan, Umum Daerah (BLUD) dan dampak, manfaat dan resisa kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selanjutnya anggaran tersebut dialokasikan kembali dengan pemerintah pusat, pada masing-masing BLUD dalam hal ini Kementerian dan satuan pendidikan sekolah. PUPR," paparnya. (fir)

"Kedepannya dengan dukungan legislatif, kami akan berupaya untuk menekan Silpa dengan cara merasionalisasi target pendapatan, target belanja dan target pembiayaan dalam KUA-PPAS disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada," ungkapnya.

Rencana pembangunan Jembatan Garuda juga menjadi sorotan Fraksi Partai Hati Nurani Golkar Bintang Demokrat dan Fraksi Partai